



WALI KOTA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 100.3.3.3/Kep. 16 -Huk/2026

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2026

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang

- : a. bahwa program pembentukan Peraturan Wali Kota sangat penting dalam rangka melaksanakan dan mengembangkan sistem tata kelola Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, dan bersih;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan dengan keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QRCode di samping.

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2026.
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 Januari 2026



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QRCode di samping.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 100.3.3.3/Kep. 16 –Huk/2026

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
WALI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2026

NO	JUDUL	PEMRAKARSA
1	2	3
1.	Pelaksanaan Program Wajib Belajar 13 Tahun	Dinas Pendidikan
2.	Penguatan Pendidikan Karakter	Dinas Pendidikan
3.	Pedoman Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan
4.	Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Pendidikan/Komite Sekolah	Dinas Pendidikan
5.	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan
6.	Sistem Penerimaan Murid Baru	Dinas Pendidikan
7.	Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 112 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
8.	Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Tasikmalaya	Dinas Pendidikan
9.	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2024 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
10.	Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital by Law</i>) UPTD Khusus Rumah Sakit Daerah Umum Dewi Sartika	Dinas Kesehatan
11.	Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Dinas Kesehatan
12.	Standar Pelayanan Minimal UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dewi Sartika	Dinas Kesehatan
13.	Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dewi Sartika	Dinas Kesehatan
14.	Standar Pelayanan Minimal UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo	Dinas Kesehatan
15.	Pedoman Penatausahaan/ Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Dinas Kesehatan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QRCode di samping.

	UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya	
16.	Pedoman Perumusan dan Perhitungan Alokasi Jasa Layanan UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dewi Sartika	Dinas Kesehatan
17.	Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital by Laws</i>) UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo	Dinas Kesehatan
18.	Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo	Dinas Kesehatan
19.	Pedoman Perumusan dan Perhitungan Alokasi Jasa Layanan UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo	Dinas Kesehatan
20.	Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dewi Sartika	Dinas Kesehatan
21.	Kebijakan Akuntansi UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya	Dinas Kesehatan
22.	Pedoman Pengadaan Barang /Jasa pada UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo	Dinas Kesehatan
23.	Kebijakan Akuntansi UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dewi Sartika Kota Tasikmalaya	Dinas Kesehatan
24.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas Kesehatan
25.	Pedoman Pengadaan Barang /Jasa pada UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dewi Sartika	Dinas Kesehatan
26.	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo pada Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
27.	Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita Di Kota Tasikmalaya	Dinas Kesehatan
28.	Penyelenggaraan Program Imunisasi Rutin Lengkap	Dinas Kesehatan
29.	Pembentukan UPTD <i>Public Safety Center</i> 119	Dinas Kesehatan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QRCode di samping.

30.	Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Aquired Immuno Deficiency Sindrome dan Infeksi Menular Seksual	Dinas Kesehatan
31.	Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
32.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Parkir di Luar Badan Jalan	Dinas Perhubungan
33.	Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan bagi Masyarakat Miskin Berprestasi	Dinas Sosial
34.	Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2025 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanganan Kemiskinan	Dinas Sosial
35.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tentang Kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
36.	Pemajuan Kebudayaan Daerah	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
37.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
38.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Hubungan Kerja Pelayanan pada Mall Pelayanan Publik Kota Tasikmalaya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
39.	Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
40.	Penyelenggaraan Kota Layak Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
41.	Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
42.	Pedoman Penerapan Sistem Informasi Karsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Karsipan Daerah



43.	Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
44.	Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya	Dinas Komunikasi dan Informatika
45.	Penyelenggaraan Pemerintah Digital	Dinas Komunikasi dan Informatika
46.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Limbah Domestik	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
47.	Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
48.	Kebijakan dan Strategi Sistem Pelayanan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
49.	Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
50.	Peraturan Pelaksanaan Retribusi Penyediaan /Penyedotan Kakus dan Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran dan Industri	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
51.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
52.	Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 39 tahun 2016 tentang Jarak Bebas Bangunan dan Pemanfaatan Garis Sempadan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
53.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Kota Tasikmalaya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
54.	Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
55.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
56.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
57.	Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QRCode di samping.

		Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
58.	Kajian Risiko Bencana Kota Tasikmalaya Tahun 2024-2028	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
59.	Rencana Penanggulangan Bencana Kota Tasikmalaya Tahun 2026-2030	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
60.	Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Badan Pendapatan Daerah
61.	Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Badan Pendapatan Daerah
62.	Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Badan Pendapatan Daerah
63.	Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah	Badan Pendapatan Daerah
64.	Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Badan Pendapatan Daerah
65.	Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Badan Pendapatan Daerah
66.	Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame	Badan Pendapatan Daerah
67.	Pedoman Analisis dan Penentuan Besaran Prosentase Penyesuaian Dalam Kegiatan Pemutakhiran Zona Nilai Tanah dan/atau Nilai Indikasi Rata-Rata	Badan Pendapatan Daerah
68.	Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Badan Pendapatan Daerah
69.	Pengawasan, Kepatuhan dan Pengendalian Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah
70.	Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah
71.	Penyelenggaraan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah
72.	Penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan	Badan Pendapatan Daerah
73.	Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah
74.	Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
75.	Pencegahan dan Pemberantasan	Badan Kesatuan Bangsa



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QRCode di samping.

	Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	dan Politik
76.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
77.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
78.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
79.	Penyelenggaraan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
80.	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kota Tasikmalaya Tahun 2026 - 2030	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
81.	Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
82.	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
83.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Percepatan ke-1)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
84.	Perubahan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
85.	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
86.	Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Percepatan ke-2)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
87.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
88.	Penggunaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QRCode di samping.

		Keuangan dan Aset Daerah
89.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Percepatan ke-3)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
90.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
91.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
92.	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
93.	Kemampuan Keuangan Daerah untuk Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2027	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
94.	Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
95.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Percepatan ke-1 Setelah Perubahan APBD)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
96.	Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Percepatan ke-2 Setelah Perubahan APBD)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
97.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
98.	Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
99.	Hari Kerja dan Jam Kerja Serta Apel Gabungan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya	Bagian Organisasi
100.	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Perpustakaan dan Arsip	Bagian Organisasi
101.	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Komunikasi dan Informatika	Bagian Organisasi
102.	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Satuan Polisi Pamong Praja	Bagian Organisasi
103.	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Pendapatan Daerah	Bagian Organisasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QRCode di samping.

104.	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bagian Organisasi
105.	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bagian Organisasi
106.	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bagian Organisasi
107.	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bagian Organisasi
108.	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bagian Organisasi
109.	Tugas Pokok, Rincian Tugas Unit dan Tata Hubungan Kerja Staf Ahli	Bagian Organisasi
110.	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan	Bagian Organisasi
111.	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pos Kesehatan dan Rumah Potong Hewan	Bagian Organisasi
112.	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan	Bagian Organisasi
113.	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat	Bagian Organisasi
114.	Hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Bagian Organisasi
115.	Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya	Bagian Organisasi
116.	Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi
117.	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD dr. Soekardjo	Bagian Organisasi
118.	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Dewi Sartika	Bagian Organisasi
119.	Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bagian Organisasi
120.	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi



121.	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Sekretariat DPRD	Bagian Organisasi
122.	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Inspektorat	Bagian Organisasi
123.	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan	Bagian Organisasi
124.	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Bagian Organisasi
125.	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bagian Organisasi
126.	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Bagian Organisasi
127.	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan	Bagian Organisasi
128.	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bagian Organisasi
129.	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bagian Organisasi
130.	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Ketenagakerjaan	Bagian Organisasi
131.	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Bagian Organisasi
132.	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Bagian Organisasi
133.	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bagian Organisasi
134.	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Organisasi
135.	Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tasikmalaya	Bagian Organisasi
136.	Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi
137.	Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat	Bagian Pemerintahan
138.	Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Bagian Pemerintahan



139.	Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
140.	Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
141.	Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QRCode di samping.